

ANALISIS ALOKASI BELANJA MODAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

Deviana, Husaini, Abdullah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This study aims to analyze the proportion of capital expenditures allocated and justified in poverty alleviation in the Seluma Regency. The sample of this research is five local government organizations (OPD) which are under the auspices of Seluma Regency. This study found that the allocation of capital expenditure for poverty alleviation during the period of 2014-2016 is fluctuated with the largest funds allocated in 2014 which amounted to 86,71% of total capital expenditure from Seluma Regency Budget and the smallest allocation of funds occurred in 2015 which amounted to 35,14% of total capital expenditure of Seluma Regency Budget. The study found that Seluma Regency has implemented poverty alleviation programs with high allocation of capital expenditure in activities related to poverty alleviation as the evidence.

Keywords: Capital Expenditure, Poverty Alleviation, Budget Realization

1. Pendahuluan

Kemiskinan sudah sejak lama menjadi masalah nasional yang sampai saat ini belum terpecahkan. Keadaan tersebut merupakan salah satu penyebab munculnya masalah kesehatan, kriminalitas dan juga pendidikan menjadi salah satu dampak dari adanya kemiskinan, karena itu kemiskinan merupakan akar berbagai masalah-masalah sosial lainnya di Indonesia.

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan segenap elemen masyarakat lainnya (perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya / organisasi masyarakat, dan masyarakat miskin) untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

Jhingan (2007) mengemukakan bahwa syarat utama bagi pembangunan ekonomi adalah bahwa proses pertumbuhan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri yakni memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan material harus muncul dari masyarakat warga negeri itu sendiri. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka perencanaan pembangunan di daerah harus direncanakan dengan baik. Pembangunan akan berjalan dengan baik apabila perencanaan pembangunan dilakukan dengan cermat yang didukung oleh sumber sumber pendapatan daerah. Perencanaan pembangunan yang baik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merubah kondisi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Salah satu masalah dalam pelaksanaan pembangunan adalah kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi persoalan yang kompleks dan menjadi tantangan yang besar bagi daerah untuk berkembang

dan maju sesuai dengan kekayaan sumber daya yang terkandung di daerah masing masing. Untuk itu, sudah seharusnya pengelolaan anggaran dan belanja yang disusun dalam berbagai perencanaan pembangunan diharapkan pada akhirnya mampu menekan tingkat kemiskinan di daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan seperti aset daerah, infrastruktur, sarana dan prasarana dasar daerah. Alokasi dana untuk belanja modal itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat produktivitas pemerintah daerah yang dicerminkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), efisiensi dalam pengelolaan belanja modal, cakupan wilayah pemerintah daerah, dan perbedaan karakteristik setiap daerah otonom Indonesia (Rochmatullah et al, 2016). akan tetapi, Owuru dan Farayibi (2016) menunjukkan bahwa alokasi belanja modal selama tidak terbukti membantu dalam pengentasan kemiskinan tetapi belanja barang menunjukkan pengaruh besar dalam pengentasan kemiskinan di Nigeria.

Kabupaten Seluma merupakan satu-satunya kabupaten tertinggal di Provinsi Bengkulu yang memiliki jumlah penduduk miskin masih tinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar 38.940 jiwa (21,17 %) meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 42.470 jiwa (22,98 %). Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di Kabupaten Seluma dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani masalah ini. Peningkatan belanja modal daerah berarti diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Seluma. Berkaitan dengan hal itu, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap belanja modal, apa saja item belanja modal yang sangat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan seberapa besar proporsi belanja modal pada APBD.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek penting yang harus diatur oleh pemerintah daerah dan juga oleh pemerintah pusat. Dalam bidang keuangan, lebih dikenal Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2004).

Dalam rangka mengimplementasikan teori stakeholders, penyusunan anggaran harus berbasis kinerja dan telah diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Basis kinerja berarti bahwa penyusunan anggaran itu harusnya lebih berfokus peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan APBD.

2.2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. APBD mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya (Nurmainah, 2013).

APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD adalah suatu anggaran daerah, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 tahun (Halim, 2012).

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. belanja daerah dipergunakan oleh provinsi dan kabupaten/kota guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah dalam suatu bagian atau bidang tertentu pada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2.3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal. Dalam hal ini pembelanjaan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya (Halim, 2012).

Menurut Wendorff (2005), Belanja modal pemerintah daerah merupakan komitmen jangka panjang, yang membutuhkan analisis menggunakan perspektif jangka panjang oleh administrator, dan harus memberikan manfaat untuk beberapa tahun ke depan. Belanja modal pemerintah harus fokus pada usaha produktif. Penghematan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi slogan pejabat publik. Keamanan yang memadai dari milik publik harus dipromosikan. (Uma, 2013).

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Dalam hal tersebut masuk ke dalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan. Dalam hal ini aset yang tetap akan memiliki berbagai macam ciri-ciri yang dapat berwujud dengan kata lain ciri-ciri yang ada dalam belanja modal sifatnya dapat terlihat (Apriana dan Supriyanto, 2010).

Adapun ciri-ciri dari belanja modal meliputi:

- Berwujud
- Sifatnya menambah
- Memiliki manfaat yang lebih dari satu periode
- Nilainya relatif material

2.4. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Kurniawan, 2017). Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat terbatas terutama di daerah pedesaan. Alasan tersebut dikarenakan untuk tingkat buta huruf dan angka kemiskinan yang tinggi (Ugoh & Ukpere, 2009).

Hidup miskin merupakan kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

2.5. Hubungan Belanja Modal Dalam Pengentasan Kemiskinan

Salah satu ukuran dari tingkat desentralisasi pemerintahan di sebuah negara adalah otonomi pemerintah daerah dari berbagai lembaga pemerintah daerah (Hogye, 2002). Belanja modal yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah mengacu pada proyek-proyek ukuran relatif besar dan berumur panjang biasanya minimal lima belas sampai dua puluh tahun. Pengeluaran tersebut dirancang untuk menyediakan fasilitas pemerintah baru atau tambahan untuk pelayanan publik.

Tujuan adanya belanja modal adalah untuk menyediakan fasilitas umum utama yang memiliki usia yang relatif panjang sebagai pelayanan terhadap masyarakat, penganggaran belanja modal harus melibatkan perencanaan, pemrograman dan perumusan kebijakan agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat (Olurankinse, 2011). Dilihat dari indikator utama kemiskinan yang ditetapkan oleh BAPPENAS maka hubungan belanja modal dalam pengentasan kemiskinan yang dilihat dari OPD terkait adalah sebagai berikut:

- Kurangnya sandang, pangan dan perumahan yang tidak layak
Untuk meningkatkan ketersediaan sandang, pangan, dan perumahan, maka pemerintah daerah melalui OPD terkait yaitu OPD Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Dinas PUPR dapat kita lihat seberapa besar pemerintah daerah dalam memproporsikan belanja modal yang dikucurkan ke OPD tersebut.
- Dinas Sosial yang mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan seperti: Belanja bantuan kube, Belanja bantuan RSTLH (Rumah Sangat Tidak Layak Huni), Belanja bantuan kepada fakir miskin, Bantuan lansia miskin, dan Bantuan orang terlantar
- Dinas Pertanian dengan kegiatan :Belanja bantuan benih padi, jagung dan kedelai, dan Belanja bantuan alat alat pertanian
- Dinas PUPR dengan kegiatan antara lain:Pembangunan jalan, Pembangunan jembatan, Pembangunan irigasi, Pembangunan perumahan tidak layak huni
- Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Seluma harus mengalokasikan belanja modal yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan kepada ketiga OPD tersebut.
- Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat alat produktif
Akses masyarakat miskin terhadap kepemilikan tanah dan alat serta sarana produksi sulit untuk diperoleh. OPD di lingkup pemerintahan kabupaten Seluma memberikan perhatian terhadap

program penanggulangan kemiskinan berupa penyediaan alat dan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat.

Salah satu OPD yang menangani masalah alat dan sarana produksi adalah dinas pertanian melalui program berupa belanja modal alat dan mesin pertanian.

- Kurangnya kemampuan membaca dan menulis
Berkenaan dengan membaca dan menulis berkaitan dengan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana Pemerintah Kabupaten Seluma mengalokasikan belanja modal untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis melalui program peningkatan mutu pendidikan, berupa belanja modal peningkatan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari PAUD hingga SLTA dan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
- Kurangnya jaminan kesejahteraan hidup
Hal ini merupakan salah satu faktor tingginya tingkat kemiskinan maka dalam hal ini bisa diharapkan pada pemerintah untuk mengalokasikan belanja modal kepada OPD dinas kesehatan agar dapat meningkatkan program jaminan kesehatan daerah dan juga alokasi belanja modal yang di berikan pada OPD dinas sosial untuk meningkatkan program usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin, Karena Di OPD tersebut memiliki kegiatan:
 - Dinas Sosial
 - Kegiatan verifikasi dan validasi JKN
 - Kegiatan verifikasi dan validasi data BDT
 - Kegiatan bantuan UEP
 - Kegiatan bantuan PKH
 - Dinas Kesehatan
 - Kegiatan fogging
 - Sunatan masal
 - Bidan PTT dan bidan PTT
 - Alokasi dana jamkesda
- Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi
Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi akan dapat dikurangi dengan alokasi belanja modal ke OPD dinas Sosial yang bisa meningkatkan program pemberdayaan masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat miskin karena dinas Sosial memiliki program antara lain:
 - Bantuan UEP Kube
 - Bantuan UEP lansia produktif
 - Bantuan UEP disabilitas
- Ketakberdayaan atau daya tawar rendah
Hal ini disebabkan ekonomi atau income perkapita yang rendah dari masyarakat hal ini berkaitan dengan program peningkatan harga dari hasil dan mutu pertanian yang dikelola masyarakat miskin sangat rendah sehingga alokasi belanja modal dikedua OPD tersebut harus dialokasikan sehingga kedua opd tersebut bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan daya saing dan mutu hasil pertanian yang tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, karena Dinas Pertanian memiliki kegiatan berupa peningkatan mutu bibit unggul misalnya bibit kates kalifornia dan bagaimana cara pemasarannya
- Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas

Dalam hal ini pemerintah dapat mengalokasikan belanja modal kepada OPD PUPR dan OPD Dinas pendidikan karena OPD ini memiliki program:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu peningkatan infrastruktur bangunan sekolah dan meningkatkan akses pendidikan agar dapat bersaing kedepannya.
- Dinas PUPR yaitu peningkatan infrastruktur jalan menuju lokasi pendidikan.

Dilihat dari 7 indikator diatas maka dengan besarnya alokasi anggaran belanja modal ke program tersebut diatas maka secara otomatis Pemerintah Kabupaten Seluma sudah menjalankan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang sesuai dengan visi dan misi BUPATI SELUMA terpilih dan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seluma.

2.6. Penelitian Terdahulu

Affandi (2014) menguji pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera.

Yuliana (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pendapatan perkapita dan akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatera. Hal ini juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk lebih meningkatkan belanja pemerintah terutama dalam belanja modal.

Zartika (2016) menunjukkan bahwa faktor penyebab kemiskinan masyarakat desa di Kabupaten Muna adalah besarnya beban tanggungan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, rendahnya tingkat pendapatan, serta kepemilikan sarana produksi yang masih sederhana dan etos kerja rendah.

Sumbayak (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan dimana variabel pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan.

Sendow (2016) merumuskan bahwa belanja sosial dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kota Manado. Owuru dan Farayibi (2016) menemukan bahwa alokasi belanja modal selama periode penelitian tidak terbukti membantu dalam pengentasan kemiskinan tetapi belanja barang menunjukkan pengaruh besar dalam pengentasan kemiskinan di Nigeria.

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa definisi operasional, yaitu:

- Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” lapangan.

- Pengalokasian adalah memberikan atau menempatkan dana sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis besaran dan kegunaannya.
- Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Belanja modal merupakan bagian realisasi belanja APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Seluma yang dilakukan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya serta infrastruktur dan sarana-prasarana pembangunan dalam yang diukur dalam satuan rupiah per tahun.
- Pengentasan kemiskinan adalah upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pengukuran variabel dilakukan dengan cara membandingkan total belanja modal yang berhubungan pengentasan kemiskinan dengan total belanja modal pada suatu OPD

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Seluma dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Seluma pada 5 OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series tahun 2014 - 2016. Data yang digunakan adalah APBD dalam berupa data belanja modal yang tercantum APBD Tahun Anggaran 2014 - 2016 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Seluma dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Seluma.

3.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis berisi pengujian-pengujian data yang diperoleh dari hasil pengolahan data sekunder yang diterima, kemudian dianalisis berdasarkan angka-angka yang diolah menggunakan Microsoft Excel.

Dalam penelitian ini metode analisis adalah melihat proposi dari belanja modal yang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan dan kemudian dibandingkan total alokasi belanja modal OPD, serta melihat jenis-jenis belanja modal yang ada pada 5 OPD di Kabupaten Seluma.

Analisis terhadap alokasi belanja modal dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seluma dilakukan berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014-2016 untuk 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

Untuk memperdalam analisis data berdasarkan LRA tersebut, maka dilakukan penyebaran kuisioner/daftar pertanyaan untuk 5 OPD dan kuisioner/ daftar pertanyaan untuk penerima manfaat adanya alokasi dana pengentasan kemiskinan. Penerima manfaat tersebut terdiri dari wakil masyarakat yang berada di lokasi belanja modal dari ke 5 OPD tersebut

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Belanja Modal Dinas Pertanian

Alokasi dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan sebesar Rp7.718.742.692 dari total belanja modal Rp11.684.768.399 atau sebesar 66,06 % di tahun 2014. Belanja modal terbesar untuk pengentasan kemiskinan di tahun 2014 dialokasikan untuk pembangunan jalan usaha tani yang diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi persawahan. Pada tahun 2015 dan 2016 anggaran belanja modal sebesar Rp4.364.213.000 dan Rp4.341.048.959. Dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, program pengentasan kemiskinan menjadi fokus pembangunan di Dinas Pertanian Kabupaten Seluma. Hal ini terlihat pada besaran dana yang dianggarkan untuk pengentasan kemiskinan, yaitu Rp4.079.713.000 atau 93,48% dari total belanja modal pada tahun 2015 dan Rp3.815.398.959 atau 87,89% dari total belanja modal pada tahun 2016.

Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Seluma yang mendapat alokasi dana yang cukup besar baik yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terutama yang hidup di perdesaan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

Identifikasi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari belanja modal APBD Kabupaten Seluma proporsinya berkisar antara 66,01 - 93,45 %. Alokasi untuk program penanggulangan kemiskinan di Dinas Pertanian meliputi pengadaan alat dan mesin pertanian seperti hand tractor, pengadaan obat-obatan berupa pestisida, pembangunan lumbung padi, pembangunan dan perbaikan irigasi tersier di areal persawahan, pembangunan jalan usaha tani dan jalan sentra produksi. Selain itu, juga diberikan bantuan dalam bentuk benih tanaman perkebunan dan subsidi pupuk. Untuk sub sektor peternakan, dalam rangka meningkatkan produksi peternakan sapi potong, dilakukan pengadaan peralatan untuk inseminasi buatan, pembangunan pusat kesehatan hewan, dan pengadaan alat-alat laboratorium peternakan. Kegiatan-kegiatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat terutama masyarakat miskin yang berada di perdesaan.

4.2. Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja modal untuk pengentasan kemiskinan Dinas PUPR Kabupaten Seluma tahun 2014 menggunakan 98,86% atau sebesar Rp141.494.384.719 dari Rp143.132.130.380 total belanja modal.

Belanja modal untuk pengentasan kemiskinan terbesar dialokasikan untuk pembangunan jaringan konstruksi jalan sebanyak 70,83%. Selain konstruksi jalan, terdapat empat program lain yang dilakukan dengan tujuan pengentasan kemiskinan, yaitu pengadaan konstruksi jembatan, konstruksi jaringan air bersih, konstruksi dan rehab gedung serta pengadaan gorong-gorong atau drainase. Keempat program ini menggunakan 28,02% atau sebesar Rp40.107.513.193 dari total keseluruhan belanja modal.

Konstruksi jalan dengan kondisi tidak layak menjadi jalan yang layak pakai tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi angka kecelakaan, tetapi juga mendukung efisiensi waktu masyarakat Seluma. Selain itu, adanya jaringan jalan memudahkan masyarakat mengakses fasilitas-fasilitas

umum dan pemerintah seperti untuk pendidikan, kesehatan maupun memperlancar aktivitas perekonomian Kabupaten Seluma.

Pada tahun 2015, total belanja modal sebesar Rp74.979.432.276 dengan 94,22% atau Rp70.646.804.700 dipergunakan untuk pengentasan kemiskinan. Terdapat enam program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di tahun 2015. Infrastruktur jalan dan irigasi beserta jaringannya mendapatkan alokasi belanja modal terbesar yaitu 55,40% dari total belanja modal, sedangkan pembangunan dan rehabilitasi jembatan berada di urutan kedua dengan alokasi sebesar 17,66% dan pembangunan jaringan irigasi sebesar 11% dan pembangunan sarana air bersih sebesar 10,16% dari total belanja modal.

Belanja modal di tahun 2016 meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana belanja modal untuk pengentasan kemiskinan sebesar 60,19% atau Rp145.785.992.299 dari total belanja modal sebesar Rp242.211.823.069. Pembangunan jaringan air bersih/baku yang merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian utama Dinas PUPR pada tahun 2016 dengan alokasi belanja modal sebesar 40,59%. Pembangunan jaringan jalan dan irigasi juga menggunakan 40,59% dari total belanja modal.

Dinas PUPR merupakan OPD strategis yang mendapat alokasi dananya cukup besar baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma, APBD Provinsi, maupun APBN.

Pembangunan di Dinas PUPR diarahkan untuk membenahi infrastruktur dasar terutama jaringan jalan oleh masyarakat. Hasil identifikasi kegiatan pengentasan kemiskinan yang bersumber dari belanja modal APBD Kabupaten Seluma, proporsinya berkisar antara 60,18 - 98,85%.

Alokasi untuk program pengentasan kemiskinan di Dinas PUPR meliputi pembangunan jalan. Adanya pembangunan jaringan jalan tersebut akan memudahkan masyarakat terutama masyarakat pedalaman untuk mencapai akses transportasi agar memudahkan membawa hasil buminya, sehingga masyarakat tersebut dapat menjualnya dan akan meningkat penghasilannya dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat..

Pembangunan irigasi merupakan salah satu prioritas di Dinas PUPR. Adanya pembangunan irigasi akan memudahkan masyarakat dalam dalam mengairi sawahnya sehingga masyarakat dapat berusaha tani dengan baik..

Pembangunan jembatan di sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedalaman yang selama ini mengalami kesulitan akses, tapi dengan dibangunnya jembatan akan mempermudah mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mengangkut hasil buminya.

Perbaikan jalan akan memperlancar arus transportasi yang selama ini menempuh waktu yang cukup lama, maka dengan adanya perbaikan jaringan jalan terutama jalan penghubung antar desa akan memudahkan masyarakat dalam membawa hasil buminya untuk dijual dan dapat menekan ekonomi biaya tinggi.

4.3. Belanja Modal Dinas Sosial

Belanja modal untuk pengentasan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Seluma tahun 2014 sebesar Rp379.585.560,- atau 96,10% dari total belanja modal sebesar Rp394.585.560,-. Belanja modal terbesar dialokasikan untuk pengadaan gudang buffer stock sebanyak 50,69% sebagai gudang persediaan penyangga yaitu penyangga sejumlah kebutuhan masyarakat Kabupaten Seluma. Sementara itu belanja bantuan kepada fakir miskin mendapatkan alokasi sebanyak 30,82% dan belanja modal untuk disabilitas mendapatkan alokasi sebanyak 14,70%.

Pada tahun 2015, belanja modal untuk pengentasan kemiskinan menurun menjadi Rp89.986.500,- atau sebanyak 51,63% dari total belanja modal sebesar Rp174.286.500,-. Alokasi belanja modal untuk pengentasan kemiskinan digunakan untuk belanja bantuan kepada fakir miskin dan sebesar 48,37% digunakan untuk belanja modal peralatan dan pengadaan alat rumah tangga.

Belanja modal pada tahun 2016 meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Belanja modal untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp479.793.997,- atau 26,80% dari total belanja modal sebesar Rp1.783.543.997,-. Alokasi belanja modal untuk pengentasan kemiskinan di tahun 2016 digunakan untuk melanjutkan program yang telah berjalan di tahun sebelumnya, yaitu untuk belanja bantuan kepada fakir miskin sebesar 26,90% dari total keseluruhan belanja modal tahun 2016. Namun, sebagian besar dari total belanja modal digunakan untuk kepentingan yang tidak berhubungan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan, yaitu sebesar 54,71% dari total belanja modal digunakan untuk pengadaan gedung dan bangunan serta pengadaan bangunan bersejarah dengan tujuan untuk melestarikan peninggalan sejarah di Kabupaten Seluma dan 18,39% digunakan untuk belanja modal pengadaan kendaraan bermotor.

Dinas Sosial merupakan dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat terutama masyarakat miskin. Alokasi dana untuk Dinas Sosial baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma, APBD Provinsi, maupun APBN. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan masyarakat miskin akan terbantu dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Adapun program di Dinas Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan meliputi belanja bantuan kepada fakir miskin. Adanya kegiatan tersebut berupa paket sembako untuk masyarakat miskin yang diberikan sebelum lebaran sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya terutama kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri.

Belanja bantuan kepada penyandang disabilitas yang sebagian besar merupakan masyarakat miskin akan sangat terbantu dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat tersebut sangatlah sulit apalagi untuk membeli alat bantu penyandang disabilitas. Selain itu, dengan diberikannya alat bantu tersebut, maka membantu mereka dalam bekerja untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Belanja bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program unggulan Dinas Sosial yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN. Dengan adanya program bantuan ini, masyarakat sangat tertolong terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan yang taraf hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Bentuk bantuan KUBE ini adalah berupa pembelian ternak sapi, pembelian tenda, alat-alat prasmanan, industri rumah tangga, alat perontok padi, pembuatan tahu dan tempe, alat untuk industri kerupuk.

4.4. Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Belanja modal untuk pengentasan kemiskinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma tahun 2014 sebesar Rp19.496.363.773,- atau 47,60% dari total belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp40.961.289.347,-. Alokasi sebesar 26,53% digunakan untuk pembangunan bangunan dan sarana gedung untuk menambah fasilitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Seluma yang merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Pengadaan alat-alat laboratorium juga memiliki proporsi belanja modal sebesar 16,8% menunjukkan bahwa program ini merupakan salah satu hal penting yang dapat dilakukan dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Alokasi sebesar 4,88% digunakan untuk pengadaan buku penunjang pendidikan.

Pada tahun 2015, keseluruhan dari total belanja modal digunakan untuk pengentasan kemiskinan yaitu sebesar Rp9.754.201.265,- karena tidak ada penambahan program lain selain dari yang berhubungan dengan belanja modal untuk pengentasan kemiskinan. Alokasi belanja modal di tahun 2015 sebesar 37% digunakan untuk pengadaan alat peraga/praktek sekolah, sebesar 24,99% digunakan untuk pengadaan laboratorium, sebesar 22,40% digunakan untuk pengadaan peralatan sekolah, sebesar 15,07% digunakan untuk pengadaan alat kantor lainnya dan alat-alat rumah tangga, dan bantuan untuk beasiswa miskin untuk membantu para siswa yang sebenarnya memiliki prestasi namun terkendala dengan dana, dimana program tersebut merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.

Hal yang sama juga terjadi di tahun 2016 dimana seluruh belanja modal yang dialokasikan digunakan dengan tujuan mengupayakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seluma yaitu sebesar Rp10.881.260.600,-. Alokasi dana ini meningkat dibandingkan tahun 2015. Dana terbesar untuk program pengentasan kemiskinan di tahun 2016 digunakan untuk pengadaan alat dan sarana pendidikan sebesar 49,91%, dan sebanyak 26,91% dialokasi untuk pengadaan komputer unit jaringan yang berguna dalam memperluas koneksi antar komputer melalui server yang terhubung dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Alokasi sebesar 13,49% digunakan untuk pembangunan kantor sebagai penunjang bagi para tenaga pendidik agar dalam melakukan aktivitas belajar-mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

endidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Seluma, Alokasi dana untuk sektor pendidikan cukup besar baik yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin. Adanya program dan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan membantu terutama anak-anak yang miskin dapat bersekolah gratis. Beberapa kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pembangunan dan sarana gedung, alat-alat laboratorium, pengadaan buku, beasiswa untuk siswa miskin, pengadaan alat peraga/praktek sekolah, pengadaan komputer dan unit jaringan, serta pembangunan gedung sekolah.

Hasil identifikasi program pengentasan kemiskinan yang bersumber dari belanja modal APBD, proporsinya berkisar antara 47,59% sampai dengan 100%. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Seluma sangat memberikan perhatian yang serius dalam pengentasan kemiskinan terutama di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma.

4.5. Belanja Modal Dinas Kesehatan

Belanja modal untuk pengentasan kemiskinan Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma tahun 2014 sebesar Rp4.029.188.000,- sedangkan total belanja modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma adalah sebesar Rp4.743.138.000,-. Belanja modal terbesar dialokasikan untuk pengadaan alat alat kedokteran/alat kesehatan sebagai prasarana yang digunakan oleh tenaga medis dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Seluma.

Pada tahun 2015, belanja modal untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp6.748.505.000,- sedangkan total belanja modal sebesar Rp8.122.866.250,-. Alokasi belanja modal di tahun 2015 sebagian besar digunakan untuk pengadaan bangunan kesehatan untuk meningkatkan jangkauan layanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Seluma. Belanja modal di tahun 2016 meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana belanja modal untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp5.822.502.500,- dengan total belanja modal sebesar Rp7.112.161.306,-.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu OPD strategis Kabupaten Seluma. Alokasi untuk Dinas Kesehatan cukup besar baik yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD kabupaten Seluma salah satu program unggulan bupati adalah pengentasan kemiskinan. Hasil identifikasi kegiatan pengentasan kemiskinan di Dinas Kesehatan yang bersumber dari belanja modal, proporsi berkisar antara 81,86% - 84,94%.

Alokasi untuk program pengentasan kemiskinan di Dinas Kesehatan meliputi pembangunan puskesmas, puskesmas pembantu, polindes. Adanya pembangunan sarana kesehatan tersebut sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses sarana kesehatan dan masyarakat dapat berobat dengan gratis. Adanya pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adanya puskesmas dan pusku di daerah pedalaman dan terpencil akan memudahkan masyarakat dalam mengakses sarana kesehatan dan mempersingkat jarak tempuh yang selama ini belum tersedia dengan baik.

Pengadaan obat-obatan di Dinas Kesehatan sangat menolong masyarakat miskin terutama masyarakat di pedalaman, dikarenakan masyarakat miskin tersebut tidak perlu membeli obat di tempat yang jauh dan tersedia dalam jumlah yang mencukupi

4.6. Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Seluma terus melaksanakan pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk melepaskan diri dari status kabupaten tertinggal. Demi mewujudkan hal itu, pemerintah daerah mengalokasikan dana yang cukup besar terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar, sejalan dengan pernyataan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Seluma (2018) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Seluma memberikan prioritas anggaran untuk pembangunan infrastruktur terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini tercermin dari semakin tingginya alokasi dana APBD untuk program penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Seluma.

Pengentasan kemiskinan bukan hanya dapat dicapai melalui pengembangan satu sektor tertentu saja tetapi berbagai sektor yang bersentuhan dengan masyarakat.

Pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Seluma yang didukung oleh pernyataan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma (2018). Selama 3 tahun periode penelitian terlihat bahwa terjadi penurunan alokasi belanja modal untuk pengentasan kemiskinan di Dinas Pertanian yang mengalami fluktuasi pada tahun 2015 dari 93,48% namun menurun menjadi 87,89% pada tahun 2016. Penurunan alokasi belanja modal tersebut disebabkan oleh berkurangnya alokasi dana pembangunan yang bersumber dari dana DAK bidang pertanian.

Pada Dinas Pertanian, pengadaan belanja modal terbesar dikeluarkan untuk pengadaan air muka tanah berupa pembangunan jaringan irigasi desa. Adanya pembangunan pertanian yang mencakup pembangunan jaringan irigasi, jaringan jalan usaha tani, jaringan jalan sentra produksi, bantuan alat mesin pertanian, bantuan benih dan pupuk bersubsidi sangat membantu penduduk Kabupaten Seluma yang sebanyak 72,65% bermata pencaharian sebagai petani. Belanja modal ini akan meningkatkan motivasi petani dalam mengolah lahan usaha taninya sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan berupa berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Seluma.

Penelitian yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menunjukkan bahwa PUPR memiliki anggaran belanja modal terbesar dibandingkan dengan 4 dinas

lainnya. Selama 3 tahun periode penelitian terlihat bahwa terjadi fluktuasi alokasi belanja modal untuk pengentasan kemiskinan di Dinas PUPR. Pada tahun 2015 alokasinya menurun akan tetapi pada tahun 2016 alokasinya meningkat lagi. Proporsi yang mengalami penurunan disebabkan oleh berkurang alokasi dana pembangunan yang bersumber dari dana DAK bidang jalan dan bidang irigasi.

Program dinas PUPR yang menggunakan dana terbesar dialokasikan untuk pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan di Kabupaten Seluma. Penambahan panjang jalan di daerah-daerah miskin dapat membuka daerah-daerah terisolasi, meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat dan wilayah juga meningkatkan pendapatan masyarakat, mempermudah hubungan antara pusat produksi dan pusat pemasaran, mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di pedesaan, mempermudah lalu lintas barang dan jasa, serta memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas dan mengakses fasilitas-fasilitas penunjang seperti rumah sakit, sekolah maupun pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Seluma, 2018).

Selain itu, dinas PUPR juga melaksanakan pembangunan jaringan air bersih yang memiliki andil besar terhadap kehidupan masyarakat. Infrastruktur pelayanan air bersih merupakan hal yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat terutama kalangan masyarakat miskin yang hidup di pedesaan.

Pada Dinas Sosial, program yang dilaksanakan bersentuhan pada masyarakat kurang mampu seperti pemberian bantuan kepada fakir miskin yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dalam rangka melaksanakan program pengentasan kemiskinannya.

Pada tahun 2014, alokasi dana Dinas Sosial digunakan untuk membangun gudang buffer stock yang digunakan sebagai gudang penyangga agar proses pemberian bahan bantuan kepada masyarakat miskin dapat berjalan lancar. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seluma (2018) menyebutkan bahwa adanya bantuan kepada masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah dapat mendorong mereka untuk lebih produktif.

Salah satu program yang penting untuk dilaksanakan adalah program yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan adanya pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan dapat meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selama 3 tahun periode penelitian terlihat bahwa terjadi fluktuasi alokasi belanja modal untuk pengentasan kemiskinan di dinas pendidikan dan kebudayaan, tetapi proporsi belanja modal untuk pengentasan kemiskinan terus mengalami peningkatan.

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang menjadi program utama untuk pengentasan kemiskinan adalah pembangunan gedung sekolah, bantuan alat peraga atau praktek sekolah. Program-program ini membantu meningkatkan kualitas belajar dan mengajar sehingga meningkatkan mutu pendidikan yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Seluma. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat terutama usia wajib belajar 12 tahun, pemerintah daerah memberikan perhatian pada pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas dan bantuan beasiswa. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma (2018) mengemukakan bahwa anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan kepada program wajib belajar 12 tahun yang alokasi dananya diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar.

Pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut serta dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Adanya pendidikan yang terprogram dengan baik

dan menjangkau semua lapisan masyarakat, maka pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan (Ustama, 2009).

Adanya infrastruktur kesehatan memberikan pengaruh signifikan pada kehidupan masyarakat. Secara teoretis bahwa infrastruktur kesehatan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin lengkap dan baik keberadaan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Seluma akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Dinas Kesehatan sebagai perangkat pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan menjalankan program utama mereka berupa pengadaan alat-alat kesehatan, pembangunan sarana kesehatan serta renovasi aset tetap seperti puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes. Selama 3 tahun periode penelitian terlihat bahwa terjadi fluktuasi alokasi belanja modal untuk pengentasan kemiskinan di Dinas Kesehatan yang mengalami penurunan alokasi di tahun 2015 tetapi meningkat pada tahun selanjutnya.

Melalui program yang dijalankan pada Dinas Kesehatan, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Seluma akan meningkat, sehingga akan meningkatkan tingkat harapan hidup masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma (2018) mengemukakan bahwa dengan adanya pengadaan alat kesehatan dan rehabilitasi sarana kesehatan telah membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di pedesaan terutama masyarakat miskin.

Selama 3 tahun tersebut dapat dikemukakan bahwa adanya fluktuasi belanja modal yang dialokasikan dan proporsi untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seluma. Fluktuasi alokasi tersebut disebabkan adanya fluktuasi dalam alokasi anggaran dalam APBD dimana dari 5 OPD tersebut (tidak termasuk Dinas Sosial) yang sebagian besar anggaran pembangunannya dari pemerintah pusat yang bersumber dari dana DAK. Hal ini mengingat keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Ada 4 (empat) strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- Meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui peningkatan produktivitas penduduk miskin.
- Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.
- Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Ratnadi dkk (2016) menyebutkan bahwa belanja langsung berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan dan belanja langsung berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi karena belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Merdekawati dan Budiantara (2013) menyebutkan bahwa belanja langsung diarahkan kepada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ketersediaan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapat pelayanan yang lebih baik. Adanya pengalokasian belanja daerah untuk belanja modal

berpengaruh positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini menandakan alokasi belanja daerah yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan baik dalam mengurangi kemiskinan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Seluma terus berupaya untuk mengentaskan daerah dari ketertinggalan dan kemiskinan, sehingga alokasi dana APBD yang besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Alokasi belanja modal untuk pengentasan kemiskinan selama periode penelitian mengalami fluktuasi, di mana besaran belanja modal untuk pengentasan kemiskinan di tahun 2014 sebesar 86,71% dari total belanja modal dalam APBD Kabupaten Seluma mengalami penurunan di tahun 2015 yaitu sebesar 35,14% dari total belanja modal APBD Kabupaten Seluma. Namun, alokasi belanja modal untuk pengentasan kemiskinan mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 53,82% dari total belanja modal APBD Kabupaten Seluma di tahun 2016.
- Program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada kelima OPD dalam penelitian ini antara lain:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan jaringan jalan, pembangunan jaringan irigasi dan air bersih.
 - Dinas Pertanian meliputi belanja bantuan benih tanaman pangan, subsidi pupuk, belanja bantuan alat-alat dan mesin pertanian, pembangunan dan perbaikan jalan irigasi.
 - Dinas Sosial meliputi bantuan kelompok usaha bersama, rumah tidak layak huni, bantuan karang taruna, bantuan program keluarga harapan, bantuan lansia produktif.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pembangunan dan rehabilitasi sekolah, pembangunan gedung laboratorium sekolah, pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
 - Dinas Kesehatan meliputi pembangunan gedung puskesmas, sunatan massal, fogging, dan pengadaan obat-obatan.

References

- A. Dali, Bustan, 2014. Seluma Menggapai Asa: Sebelas Tahun Kabupaten Seluma. Penerbit Yayasan Pembangunan Kabupaten Seluma, Seluma.
- Affandi, Anthony. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja. Modal untuk Pelayanan Publik dalam perspektif teori keagenan (Studi pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera) Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 5, No 2. Hal 71-90.
- Apriana, D., dan Suryanto, R., 2010. Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Efisiensi. Vol.11 No.1 Januari 2010. Hal. 68 – 79.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma, 2018. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Seluma. Bastian, I. 2012. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi 3. Erlangga. Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. Tersedia di: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/363/evaluasi_belanja_modal_koreksi_akhir_kecil.pdf.
- Darise, Nurlan, 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit PT Indeks, Jakarta
- Halim, A. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Harun, 2008. Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia, Salemba Empat. Jakarta.
- Hogye, Mihaly, 2002, Local Government Budgeting, Local Government and Public Service Reform Initiative. Open Society Institute Budapest, Hungary.

- Jhingan, M.L., 1996. Ekonomi pembangunan dan perencanaan, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Kaligis, E., Engka, D., Tolosang, K., 2017. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di Minahasa Utara Melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Intervening Variabel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.17 No. 02 2015, Hal. 95 - 105.
- Kurniawan, M. 2017. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah ekonomi Global Masa Kini Volume 8 No.01 Juli 201*
- Kurniawan, O., 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penganggaran Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015, Universitas Muhamaddiyah Mojokerto.
- Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
- Nurmainah, S., 2013. Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol.20 No.2 Septemabr 2013. Hal. 131 - 141.
- Olurankinse, Felix 2011. Analysis Of The Effectiveness Of Capital Expenditure Budgeting In The Local Government System Of Ondo State. *Journal of Accounting and Taxation*. 4(1): pp:1-6
- Owuru, Joel dan Adesoji Farayibi. 2016 Examining the Fiscal Policy-Poverty Reduction Nexus in Nigeria. MPRA Paper, No. 74184
- Purbadharmaja, Ida Agus Putu. (2017). Pengaruh PAD, PMA dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 2, No. 11*
- Qatrunnada, A, dan Apriana, D., 2016. Analisis Indikator Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni ITS*. Vol.5 No.2 (2016).
- Republik Indonesia, 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah.
- _____, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- _____, 2010. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- _____, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- _____, 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- _____, 1967. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu.
- _____, 1999. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, 1999. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- _____, 2004. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____, 2014. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Ratnadi, Ni Made Dwi dan K Widyarini, 2016. Pengaruh Prosedur, Pendidikan, Tekanan Waktu, Dan Anggaran Reviu Pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.3 (2016) : 455-488
- Rochmatullah, Mahameru Rosy, Rudy Hartanto dan Arwal Arifin, 2016. Determinating The Value Of Capital Expenditure Allocation In Indonesia Local Government. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 17 (2), p162-168
- Santoso, B.Purbaya dan anshori, 2005, Analisis statistik dengan MS.Excel dan SPSS, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Sumbayak Daniel Judah, dkk, (2015), pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi sumatra selatan, vibi regional reseach, Magister perencanaan dan kebijakan publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, Februari 2015.
- Sendouw, A. 2016, pengaruh belanja modal, belanja sosial dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kota Manado, *journal*
- Ugoh, S. C and Ukpere, W. I, 2009. A profile of regional/zonal poverty in Nigeria: the case of Enugu zone. *Journal of Humanities, Social Sciences and Creative Arts*. 8: 39-52
- Uma, K. E, F. E. E, Ikechukwu, D. N., 2013. Government Expenditure in Nigeria: Effect on Economic Development. *American Journal of Social Issues and Humanities*. Vol. 3: 119-131
- Wendorff, Jill. 2005. Capital Budgeting from a Local Government Perspective. *SPNA Review*: Vol. 1: Iss. 1, Article 6
- Widayati, T. 2013. Analisis Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Demak. *Media Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 28. No. 2 Juli 2013.
- Yuliana, Lia, 2014. Analisis Determinan Belanja Modal. Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013. *Jurnal WIDYA*., Volume 3, No. 3.
- Zartika, C., 2016. Studi Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Haluoleo..